

PROSIDING

**BOROBUDUR CONFERENCE
ON PUBLIC ADMINISTRATION**

“FROM MEDIEVAL TO CONTEMPORARY THOUGHTS”



NO ISBN: 978 - 602 - 6938 - 62 - 6



SAMBUTAN DEKAN FISIPOL UNTIDAR

Masyarakat saat ini terasa bergerak/berkembang jauh lebih pesat dibandingkan sepuluh apalagi lima puluh tahun yang lalu. Teknologi informasi memungkinkan komunikasi berjalan sangat deras, sehingga perubahan yang terjadi di suatu tempat dapat tercerap seketika itu juga di tempat lain –yang dapat memicu perubahan-segera di tempat penerima ini.

Karena itu kehendak rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara di fakultas kami untuk menyelenggarakan “Borobudur Conference on Public Administration” (BCPA) ini kami sambut dan dorong dengan antusias, sekalipun pada tahun ini telah terselenggara beberapa acara sejenis, baik oleh asosiasi (AsIAN dan IAPA) maupun perguruan tinggi (UNY, UNP, UNESA dll.). Karena pastilah sejumlah acara tersebut belum cukup menampung semua karya dan hasil pemikiran rekan-rekan dosen. Seandainya seminar sejenis itu sudah berlangsung lima kali, maka kami bermaksud menggenapkannya menjadi enam di penghujung tahun. Untuk menjadi, sesuai tempatnya di Borobudur, ruang kontemplasi guna menutup kerja kita selama tahun 2016 ini. Selain untuk merenungkan dan mengevaluasi apa yang telah dikerjakan oleh para akademisi (dan praktisi) juga untuk merancang karya-karya inovatif di tahun 2017 dan masa selanjutnya.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor UNTIDAR Prof. Dr. Cahyo Yusuf, MPd. yang telah mengizinkan dan mendukung penuh pelaksanaan acara ini. Demikian juga kepada Gubernur AKMIL Mayjen. TNI Arif Rahman yang telah berkenan memberikan bantuan yang sangat berharga bagi terselenggaranya konferensi ini. Kepada seluruh anggota panitia (Dra. Eny Orbawati, MSi. dkk.) yang telah bekerja keras dalam waktu yang singkat dan di tengah kesibukan yang luar biasa di akhir tahun kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian juga atas bantuan seluruh civitas academica FISIP pada khususnya dan UNTIDAR pada umumnya.

Akhirnya kepada rekan-rekan akademisi yang telah bersedia menulis dan mempresentasikan prasarannya dalam konferensi ini kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Tanpa kehadiran rekan-rekan dari Thailand, Philipina, Padang, Riau, Bengkulu, Lampung, Manado, Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, Sidoarjo dll. acara ini kiranya tidak akan terselenggara.

Mudah-mudahan ke depannya BCPA dapat menjadi acara tahunan yang dihadiri oleh lebih banyak ilmuwan dari berbagai negara, baik dari kawasan ASEAN, Asia maupun Afrika, Eropa, Amerika dan Australia. Dari Magelang kita jadikan Indonesia gemilang dan dunia damai sejahtera....

Magelang, 21 November 2016

Samodra Wibawa

DAFTAR ISI

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENGEMBALIKAN PEMERINTAHAN DAERAH KE MODEL <i>BINNINLANDSE BESTUUR</i> DAN <i>INDIRECT RULE</i> ZAMAN KOLONIAL Prof. Dr. H. Hanif Nurcholis, M.Si.....	1
KETERLEKATAN ILMU SOSIAL DENGAN LINGKUNGAN: SUATU TELAAH ATAS PEMIKIRAN AWAL ABAD PERTENGAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMIKIRAN KONTEMPORER Tomi Setiawan.....	21
PERBANDINGAN ANTARA DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN DEMOKRASI LANGSUNG DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA Dr. BAMBANG ISTIANTO, M.Si	31
BERBAGAI PERMASALAHAN REVITALISASI BIROKRASI INDONESIA Dr. Hari Walujo Sedjati	47
PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL DI ERA GOVERNANCE Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si	55
POLICY AND EVALUATION OF INDUSTRIAL AND TRADE ROAD PERFORMANCE IN SIDOARJO, EAST JAVA PROVINCE Lailul Mursyidah/Totok Wahyu Abadi	65
EVALUATION OF RPJMDES KABUPATEN SLEMAN, BANTUL, KULON PROGO DAN GUNUNGKIDUL Ambar Teguh Sulistiyani, Kristi Yuliani, Muammar Yuliana	73
MARGINALIZATION IN PUBLIC TRANSPORTATION Budiman Widodo, Winarti.....	81
STUDENT SATISFACTION VARIABLES ANALYSIS TOWARDS THE EDUCATION SERVICE (Research in Al Muslim Full Day School (Elementary School) Sidoarjo) Dian Arlupi Utami, Galih Imam Trijono	87
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PINGGIRAN BERBASIS LIFE SKILLS MELALUI PENDIDIKAN NON FORMAL SEBAGAI PENGUATAN STABILITAS NASIONAL Endang Sri K.....	101

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG INKLUSIF (Studi Kasus pada BMT Al-Quddus Pasar Tradisional Desa di Desa Selopampang Kabupaten Temanggung)	
Iwan Prasetyo.....	113
AKSELERASI PENATAAN PROSES BISNIS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA	
Kristian W. Wicaksono, Rima Rahmawati, Robby A. Malik, William Tandi	131
PENGEMBANGAN ALTERNATIF MODEL KEBIJAKAN PENANGANAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA (ALTERNATIVE DEVELOPMENT MODEL POLICY HANDLING OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES AGAINST CHILDREN IN INDONESIA)	
Rosita Novi Andari	137
REVITALIZING WORKING CONDITION AND WORKING SYSTEM IN THE BUREAUCRACY IN INDONESIA	
Titiek Herawati, S.Sos,M.Si	155
PROGRAM KELUARGA BERENCANA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN FUNGSI KELUARGA (Studi Implementasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga)	
Yuni Lestari , Prasetyo Isbandono.....	163
INNOVATION OF INFORMATION AND COMPLAINT SERVICES: THE YOGYAKARTA CITY EXPERIENCE	
Wayu Eko Yudiatmaja.....	175
MENGURAI BENANG KUSUT KONFLIK SOSIAL MELALUI PENGUATAN KEARIFAN LOKAL MENUJU KESERASIAN SOSIAL (UNRAVEL THE SOCIAL CONFLICT THROUGH THE STRENGTHENING OF LOCAL WISDOM TOWARDS SOCIAL HARMONY)	
Ratih Probosiwi	191
STUDI PENGAMATAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PEMASARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN	
Tri Yuniningsih, Wahma	209
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA	
Hendrarto	225
MODEL REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF PEDAGANG	
Dr. Prasetyo Isbandono, M.Si ; Agus Prastyawan, S.Sos, M.Si	235

IDENTIFYING PATTERN OF BUREAUCRACY REFORM DEFICIT THROUGH CULTURAL THEORY PERSPECTIVE Arif Budy Pratama	245
STRATEGI KOTA MAGELANG MENUJU SMART CITY Eny Boedi Orbawati	253
EVALUASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR DI KOTA MAGELANG Samodra Wibawa, Sri Mulyani	269
DEVELOP OF AUTONOMY FARMERS OVERCOME CROP PESTS Ayu Rahayu	277
BUILDING A SOCIAL ACCOUNTABILITY TO STRENGTHEN RURAL COMMUNITIES FOR COMMUNITY GOVERNANCE Catur Wulandari, S.Sos., M.Si.....	289
EMPOWERMENT THROUGH JOINT BUSINESS GROUP (KUBE) STUDY GROUP KELOMPOK USAHA KREASI WANITA PASUNDAN BALONGGEDE DISTRICT MUNICIPALITY REGOL BANDUNG Henri Rohaeni	301
LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN DOCTOR PATIENT IN THERAPEUTICTRANSACTION IN RSUD PROF.DR.MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H	315
MENINGKATKAN KAPABILITAS ORGANISASI PUBLIK (STUDI PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KARO PROPINSI SUMATERA UTARA) Simson Ginting	325
MANAGEMENT REFORMATION CIVIL STATE APPARATUS Syakdiah	339
LAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE: SASARAN KEBERHASILAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) Titi Darmi	351
THE ROLE OF TRANSFORMASIONAL LEADERSHIP STYLE AT PUBLIC SERVICE SECTOR IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE Yani Restiani Widjaja.....	361
SISTEM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Arnanda Yusliwidaka	375

ADMINISTRASI PUBLIK DAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Hartuti Purnaweni	381
SWALLOW NEST TAX CONTROL IN CIREBON Heru Kuswandi, Ramadhan Pancasilawan, Rita Myrna	389
PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PUBLIK Shadu Satwika Wijaya, Rengga Vernanda	399
PENETUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN ANALISIS SEKTORAL DAN PROPINSI DI INDONESIA Recky H. E. Sendouw, MM, Ph.D; Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si	407
THE FLOOD VULNERABLE AREA CONSERVATION THROUGH DISASTER EDUCATION IN TUGU SUBDISTRICT SEMARANG CITY Aji Novia Prastanti	415
DAMPAK PERUBAHAN PENDAPATAN PEDAGANG PUSAT KULINER PASCA PENATAAN DI KOTA MAGELANG Retno Dewi Pramodia Ahsani, SIP, MPA	423
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA MADRASAH DAN KOMITE MADRASAH TERHADAP MOTIVASI MENGAJAR GURU MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DI KABUPATEN PATI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 Nur Rofiq	431
ENERGY POLICY IN INDONESIA: TOWARDS INDEPENDENCY Riyadi Santoso	439
ADMINISTRASI YANG EFISIEN Statement of Interests Samodra Wibawa	451
ALTERNATIVE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF REFORM: SHIFTING THE PLACE OF COMMUNITY AND BUREAUCRACY IN DEVELOPMENT Sulikah Asmorowati, S.Sos., MDevSt., Ph.D.....	453
PENINGKATAN INTEGRITAS dan KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA: REALISASI <i>GOOD GOVERNANCE</i> RM. Mahendradi, S.H., M.Si., Kuswan Haji, S.H., M.H..	473

MODEL REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF PEDAGANG

Dr. Prasetyo Isbandono, M.Si
Agus Prastyawan, S.Sos, M.Si

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Hukum, Universitas negeri
Surabaya
email : agusprastyawan@unesa.ac.id

Abstrak

Revitalisasi pasar adalah upaya menjadikan pasar semakin lebih baik untuk meningkatkan daya tarik pasar tradisional terhadap konsumen yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pedagang. Akan tetapi, kebijakan pemerintah daerah seringkali setengah-setengah dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada pedagang. Revitalisasi seharusnya bagian dari usaha memperbaiki pelayanan dan kenyamanan di areal pasar, bukan sekedar mengubah wajah (bangunan) pasar tradisional menjadi sesuai dengan keinginan pemerintah daerah, apalagi sampai menghilangkan arsitektur bangunannya dan keunikannya.

Kata Kunci : Revitalisasi, Pasar Tradisional, Pedagang

1. Latar Belakang

Eksistensi Pasar tradisional merupakan cerminan dari keberadaan kehidupan sosial di dalam satu area. Pasar tradisional merupakan salah satu pusat kebudayaan di Indonesia, dimana didalamnya terdapat manifestasi ekspresi perilaku dan nilai yang melekat dalam masyarakat terwujud didalamnya. Keriuhan Intensitas interaksi tawar-menawar, senda-gurau dalam pasar tradisional tidak akan ditemukan dalam pasar modern. Pasar tradisional sebagai salah satu pusat budaya terlihat ketika Pasar tradisional tidak hanya menjadi ruang jual beli tetapi lebih dari itu pasar tradisional menjadi ruang ekspresi kesenian dan kebudayaan. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam upaya membangun wawasan kebangsaan untuk ikut membangun suatu bentuk kebudayaan masa depan yang tak lepas dari akar tradisinya.

Pasar tradisional masih merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin dan home industri (industri rakyat). Jumlah mereka adalah puluhan juta dan sangat menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional. Pasar tradisional adalah wadah untuk mendapatkan berbagai keperluan dan kebutuhan pokok mayoritas penduduk di tanah air. Mereka bisa mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Pasar tradisional selalu menjadi indikator nasional dalam kaitannya dengan pergerakan tingkat kestabilan harga atau inflasi domestik. Dalam menghitung inflasi, harga kebutuhan pokok penduduk yang dijual di pasar tradisional seperti beras, gula, dan sembilan kebutuhan pokok lainnya menjadi obyek monitoring para ahli statistik setiap bulannya.

Interaksi sosial sangat kental terjadi di dalam pasar tradisional. Ini terjadi karena mekanisme transaksinya menggunakan metode tawar menawar. Selain itu, para pedagang (produsen) dan pembeli (konsumen) dapat secara langsung berkomunikasi dan saling mengenal lebih jauh, bukan hanya menyangkut barang yang diperdagangkan tetapi juga menyangkut hal lainnya. Termasuk tentang budaya masing-masing yang terkait dengan jenis masakan dan cara berpakaian. Di pasar tradisional telah berkumpul dan berinteraksi dengan damai para anggota masyarakat dari ragam latar belakang suku dan ras, mulai dari Keturunan Arab, Cina, Batak, Padang, Sunda, Jawa, Madura, Bugis serta lainnya.

Pasar tradisional merupakan kumpulan para entrepreneur dan calon entrepreneur yang pada umumnya menggunakan modal sendiri dalam memulai usahanya, pada waktu krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, para pedagang kelas menengah ke bawah justru mampu bertahan menghadapinya bila dibandingkan dengan para pengusaha besar. Melihat kemampuannya menghadapi terjerangan krisis tersebut, Kementerian Perdagangan akan melakukan pembangunan dan merevitalisasi pasar rakyat melalui dana Tugas Pembantuan (TP) untuk 272 pasar pada 2017, di mana secara keseluruhan pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 pasar setiap tahun. Tercatat, jika pembangunan pasar rakyat sesuai dengan skema rencana pemerintah, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir 2016 ini sudah melakukan pembangunan dan revitalisasi pasar sebanyak 1.880 pasar rakyat. (<https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/10/18/090813262/kemendag-revitalisasi-272-pasar-pada-2017>)

Ruh revitalisasi memang sebenarnya bersifat positif, baik bagi pedagang lama, pedagang baru (akan terjadi peluang kesempatan kerja baru) maupun bagi pemerintah daerah setempat. Revitalisasi pasar merupakan jawaban atas tuntutan perubahan jaman yang merupakan bagian dari kebijakan baru pengelola pasar tradisional dalam

menghadapi pesatnya perkembangan pasar modern, kondisi pasar yang memprihatinkan serta tuntutan konsumen. Akan tetapi di berbagai daerah, agenda revitalisasi tersebut banyak menuai kecaman atau penolakan. Salah satu contohnya adalah, agenda revitalisasi di Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo Malang. Para pedagang menolak atau memboikot agenda revitalisasi tersebut dikarenakan mereka sebagai subyek dan pemangku kepentingan tidak dilibatkan oleh DPRD Kota dan Pemerintah Kota dalam proses revitalisasi tersebut.

Bentuk penolakan para pedagang tersebut biasanya mereka melakukan perlawanan dengan membentangkan poster atau baliho yang berisi penolakan serta kecaman terhadap walikota beserta anggota DPRD Malang di depan pasar, mengirimkan surat keberatan ke gubernur Jawa Timur serta ke pemerintah pusat. Sampai saat inipun belum ada titik temu atau kesepakatan antara pengembang, pemerintah kota serta para pedagang tentang agenda revitalisasi tersebut. Para pedagang di Pasar Blimbing yang berjumlah sekitar 2000 orang saat itu diliputi perasaan cemas, berdasarkan pada berbagai kasus yang terjadi jika ada konflik antara pedagang pasar dan pemerintah atau investor, pasar itu akan "terbakar" secara misterius, para pedagang mulai melakukan pola pengamanan tertutup untuk mewaspadaai kemungkinan pembakaran itu (Kompas, 4 November 2010).

Fenomena seperti ini lazim terjadi di negara dunia ketiga dimana mekanisme penyelenggaraan pemerintahan melalui pembuatan produk kebijakan pembangunannya cenderung menguntungkan kelompok-kelompok yang sudah lebih stabil serta mapan secara ekonomi (McAuslan, 1986). Dalam konteks pembangunan di daerah, selama ini peran pemerintah daerah cenderung lebih dominan dibandingkan dengan aktor lainnya (swasta dan masyarakat). Hasil studi dari ADB (dalam Utoyo 2010) juga memperkuat argumentasi diatas, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam skema IRDA (*Indonesian Rapid Decentralization Appraisal*). Kondisi ini mengingatkan pada konsep "*Bold-State Model*" sebagaimana yang dikemukakan oleh Stillman (Keban, 2004). Dengan demikian ditengarai sektor pemerintah cenderung masih mendominasi berbagai proses dan produk kebijakan meskipun semua itu dilakukan dengan dalih dan ditujukan bagi kepentingan publik, yang menurut Kirmanto (2006) pendekatannya terkesan terlalu bersifat *government driven*. Dominasi tersebut pada gilirannya melahirkan pendekatan yang cenderung bersifat birokratis dan rasional dalam suasana formalisme terhadap berbagai proses pengambilan keputusan tanpa melibatkan aktor di luar pemerintahan lokal (bisnis dan *civil society*) atau dalam bahasa Nugroho (2007) proses formulasi

2. Model Revitalisasi Pasar Tradisional Berbasis Pedagang

Secara umum hubungan *reciprocal* atau perilaku saling tolong-menolong antar pedagang cukup tinggi. Sebagaimana yang terjadi di kota Yogyakarta, jika seorang pedagang tidak memiliki barang dagangan maka dia dengan mudah akan menjualkan dagangan milik pedagang lain dimana pembayaran komoditas tersebut baru dilakukan setelah barang terjual. Selain itu antar pedagang juga tidak segan-segan mencari supplier untuk pedagang yang lain. *Bonding network* tidak terlalu menonjol kecuali di pasar Gede yang memiliki akseptabilitas yang tidak terlalu besar terhadap pedagang non-pribumi. Selain itu pedagang di pasar tersebut juga lebih memilih mendapatkan pembeli dari masyarakat lokal yang memiliki kesamaan latarbelakang suku dan budaya (Balitbang Kementerian PU, 2011)

Keberadaan pasar tradisional telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pasar tradisional merupakan warisan budaya bangsa, tempat berlangsungnya aktivitas jual-beli yang sarat dengan nilai-nilai lokal seperti : keramahan masyarakat dalam bertegur-sapa dan riuhnya interaksi tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Namun, berkembangnya sebuah kota yang hanya dilandasi kepentingan ekonomi, membawa arah pembangunan yang mekanistik dan kota menjadi tidak manusiawi, imbasnya terlihat pada pengelolaan pasar tradisional yang semakin terpinggirkan oleh pasar modern, perdagangan hanya sekedar menjadi tempat jual-beli dan kita terjebak dalam modernisasi yang mematikan budaya lokal. Keberadaan pasar modern (termasuk laman penjualan online) secara perlahan tapi pasti telah membuat keberadaan pasar tradisional semakin terpuruk pada kurun waktu tahun 2008 – 2014 (Liu et.al, 2016).

Namun di luar dampak ekonomi dan sosial tersebut, kebijakan menggenjot keberadaan pasar modern baik di perkotaan maupun juga di pedesaan menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Salah satu konsekuensinya adalah menurunnya tingkat pengunjung pada pasar tradisional yang pada akhirnya nanti akan meniadakan keberadaan pasar tradisional yang jauh dari kata nyaman dan aman bila dibandingkan dengan keberadaan pasar modern. Di sisi lain revitalisasi pasar tradisional yang telah dilakukan selama ini hanya berkaitan dengan masalah fisik pasar, penataan pengelolannya belum tersentuh. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap prasarana publik dan pelayanan publik yang baik konsekuensinya harus diikuti dengan meningkatnya harga jasa-jasa publik tersebut, sementara fakta yang ada berkata sebaliknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Curry (2007; 7) bahwa : *"The community's expectations of its public sector have never been higher"*, Dalam konteks ini adalah keberadaan pasar tradisional yang keberadaannya saat ini cukup memprihatinkan.

Terbitnya Peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, rupanya belum mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan pasar tradisional. Perkembangan pasar modern membawa ancaman besar bagi pasar tradisional. Meskipun aturan tentang jarak, zonasi dan batasan-batasannya sudah diatur melalui Peraturan presiden No 112 tahun 2007 (meskipun tidak dikatakan dengan tegas) tetapi kenyataannya tidak terealisasi dengan baik. Bahkan keberadaan pasar tradisional berhimpitan dengan pasar modern. Toko-toko di pasar tradisional menjadi tampak sepi dan menjadi tempat tumpangan lewat para konsumen yang hendak belanja ke pasar modern. Akibatnya banyak pedagang gulung tikar. Oleh karena itu pemerintah harus membuat kebijakan yang jelas dan tegas untuk menyelamatkan pasar tradisional agar bisa menambah daya saing terhadap pasar modern.

Kondisi perekonomian Indonesia seperti saat ini dimana pertumbuhannya sangat tergantung pada sektor jasa dan industri, fungsi ruang sangat mudah berubah mengikuti kepentingan ekonomi, terutama melalui kebijakan pemerintah di bidang investasi yang cenderung tunduk kepada kehendak pasar. Konflik kepentingan atas lokasi-lokasi yang memiliki nilai ekonomis tinggi kerap terjadi antara swasta dan masyarakat, atau terkadang juga antara masyarakat dan pemerintah yang berkolusi dengan swasta. Tidak jarang memang sikap pemerintah yang terlalu mengakomodasi keinginan para pengusaha dalam memilih lokasi investasi yang ditandai kecenderungan memusat di daerah-daerah tertentu yang kadangkala harus dibayar dengan munculnya persoalan-persoalan sosial dan lingkungan di lokasi-lokasi tersebut.

Kondisi tersebut pada gilirannya telah menghasilkan perilaku birokrasi yang cenderung memihak pada kepentingan tertentu, dibandingkan dengan kepentingan maupun masalah-masalah yang secara riil dihadapi oleh publik. Birokrasi seharusnya bisa menjadi sebuah sistem yang luar biasa apabila mampu di dayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Namun yang saat ini terjadi justru sebaliknya. Dalam konteks ini masalah riil yang dihadapi oleh publik (pedagang pasar tradisional) adalah pesatnya pertumbuhan pasar modern sebesar 31,4%, sementara pasar tradisional tingkat pertumbuhannya – 8,1% (AC Nielsen, 2004).

Pesatnya pertumbuhan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak yang berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Di satu sisi, pasar modern dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba lengkap dan nyaman. Di sisi lain, pasar tradisional masih berkutut dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang profesional dan ketidaknyamanan berbelanja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dwiyanto (2006) bahwa banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

Terlebih sekarang konsep yang dipakai oleh pihak pasar modern seperti hypermarket dan sejenisnya menggunakan konsep "*one stop shooping*", dimana mereka juga menyediakan restoran (*food centre*) sebagai sarana para keluarga yang berbelanja sembari makan malam (Herbst, 2007). Kebutuhan tersebut sebagai reaksi atas tekanan pelanggan yang menginginkan adanya perubahan yang menyebabkan pemilik modal besar mengambil tindakan tersebut (Stehr, 2010). Hal senada juga diungkapkan oleh Dietsch (2010) yang mengatakan bahwa redistribusi yang obyektif pada umumnya tidak terdapat pada benak pikiran para ekonom ataupun politikus ketika mereka berbicara tentang desain institusional. Ditambah lagi selama ini, pendirian dan operasional pasar modern seperti minimarket, supermarket, hingga hipermarket sudah melanggar banyak peraturan dan perundang-undangan.

Dari perspektif ekonomi, pasar sebagai salah satu lembaga untuk penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan pengusaha golongan ekonomi lemah yang berusaha dan beraktivitas sebagai pedagang kios, pedagang lapak dan pedagang kaki lima di pasar tradisional tersebut. Dari 13.400 pasar tradisional yang terdapat di seluruh Indonesia, terserap tenaga kerja yang berusaha sebagai pedagang kecil 12,6 juta orang (APPSI Jatim). Selain itu, pasar tradisional juga berfungsi menyerap tenaga kerja yang bekerja memasok barang dagangan untuk dijual kepada pedagang di pasar tradisional tersebut.

Ketika negara dalam hal ini instansi pengelola pasar tradisional dimana salah satu tujuannya adalah untuk menunjang perekonomian nasional, maka guna mempercepat proses revitalisasi pasar-pasar tradisional dibutuhkan juga peran dari pemerintah daerah dalam mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional; meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional; memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi; memberdayakan pusat perbelanjaan dan pasar modern dalam membina pasar tradisional; dan mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional (Siaran Pers Kementerian Perdagangan, 2010).

Praktek renovasi dan revitalisasi pasar selama ini kebanyakan mengatasmakan pedagang dan tak jarang melalui penunjukkan langsung, menurut Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pemerintah seringkali "mengkhianati"

pedagang lama. Pengalaman selama ini renovasi hanya kedok untuk menyingkirkan pedagang-pedagang yang sudah berjualan disana, Jika keadaan ini dibiarkan maka dampaknya akan muncul secara luas. Tetapi tidak semuanya program revitalisasi tersebut berekses negatif, terdapat beberapa pasar tradisional di beberapa kota yang telah berhasil di-revitalisasi tanpa penolakan, bahkan justru mendapat dukungan dari para pedagang seperti di Pasar Klithikan Solo dan Pasar Beringharjo Jogjakarta.

Kunci keberhasilan Pemkot Solo dalam me-revitalisasi 15 pasar tradisional di Solo yang tanpa melibatkan investor adalah dengan mengajak dialog para pedagang sebagai perwujudan hak sebagai warga negara (Akortor, 2011) sebelum program revitalisasi tersebut dijalankan dan mengingat masyarakat (pedagang) sesungguhnya memiliki pengetahuan yang luas tentang kondisi daerahnya (Mustalahti & Rakotonarivo, 2014).. Dalam dialog tersebut Pemkot Solo menempatkan para pedagang pasar tradisional sebagai mitra dalam proses revitalisasi. Para pedagang diberi pemahaman beberapa alasan mengapa diperlukan revitalisasi yang diambilkan dana dari APBD tersebut dan pedagang diminta untuk memberikan masukan terhadap konsep pasar yang diinginkan, sehingga terjadi titik temu antara harapan pada kedua belah pihak dan kemampuan Pemkot Solo untuk mewujudkannya.

Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta juga menuai keberhasilan dalam merevitalisasi Pasar Beringharjo yang juga tanpa melibatkan investor atau pihak ketiga. Para pedagang dan pemerintah setempat sepakat untuk mendanai sendiri (Swadaya) program revitalisasi tersebut, caranya adalah pedagang yang bermodal besar menalangi terlebih dahulu, kemudian mekanisme pelunasannya dilakukan secara bertahap pada tiap bulannya. Mekanisme swadaya ini terbukti efektif dan tidak menimbulkan eksese negatif apapun. Disamping beberapa keberhasilan dalam program revitalisasi pasar tradisional tersebut, beberapa pasar tradisional di daerah lain mengalami kegagalan. Contohnya di Pasar Kosambi Bandung yang sempat ditasbihkan menjadi pasar tradisional terbaik se-Asia Tenggara, sekarang keadaannya berbanding 180°. Basement yang digunakan sebagai areal parkir bisa dibilang gelap gulita. Septictank tidak tersedia, sehingga semua limbah cair pasar langsung dibuang ke pipa yang terus mengalir ke riool. Akibatnya, saat pipa tersumbat, air menggenang di basement pasar. Lantai dua hingga enam tidak berpenghuni karena para pedagangnya angkat kaki setelah toko sepi akibat pembeli enggan berbelanja di pasar yang tidak nyaman lingkungannya. Kegagalan ini disinyalir akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara pemerintah setempat dengan para pedagang.

Pemerintah Kota Surabaya-pun juga mengalami kegagalan dalam merevitalisasi beberapa pasar tradisional di Surabaya yaitu : Pasar Blauran, Pasar Keputran dan Pasar Turi. Rencana pemkot untuk merelokasi Pasar Keputran ke Pasar Induk Puspa Agro tidak berjalan dengan mulus, masih banyak pedagang Pasar Keputran lama yang kembali berjualan di pedestrian jalan. Alasan mereka cukup klasik, takut kehilangan pelanggan atau jumlah pembeli tidak sebanyak ketika di Pasar Keputran serta ketidakmampuan mereka untuk membeli stand yang baru. Kemudian pada kasus pembangunan pasar Turi setelah terbakar, sampai saat ini masih membingungkan pedagang didalamnya karena belum ada kepastian hak mereka setelah bangunan direnovasi. Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara pemerintah kota, investor dan pedagang tidak berjalan dengan baik.

Keterlibatan pedagang sebagai salah satu stakeholder dan transparansi merupakan prinsip dasar demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Peraturan daerah sebagai peraturan tertinggi di daerah mengikat baik eksekutif maupun legislatif. Derajat

keterbukaan, partisipasi warga serta orientasi kepada pelayanan publik dalam proses penyusunan peraturan daerah (Perda) akan mencerminkan sejauhmana kemauan politik eksekutif maupun legislatif daerah dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik di daerah.

Konsep revitalisasi pasar tradisional selama ini hanya mengedepankan pembangunan secara fisik semata, tidak menyentuh pembenahan kemampuan dan manajemen pedagang. Asumsi pemerintah selama ini kondisi fisik pasar tradisional lekat dengan ketidak-teraturan, kumuh dan tidak nyaman. Sedangkan O'Hara (dalam Akortor, 2011) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pejabat pemerintah daerah beserta anggota DPRD harus selalu melibatkan warga lokal dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, bukan hanya membuat asumsi belaka.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik masyarakat lokal (pedagang) jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dimana mereka yang akan merasakan dampak kebijakan tersebut. Sangat sedikit lagi produk kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal, sehingga pada akhirnya kebijakan yang telah diambil tersebut tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan harapan pemerintah setempat. Tidak jarang sebuah produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut merupakan "titipan" atau "arahan" dari pemerintah pusat, bahkan Chandler (dalam Leach & Smith, 2001) menyebut pemerintah daerah sebagai agen administratif lokal atau "pelayan" bagi pemerintah pusat daripada sebagai lembaga pembuat kebijakan. Pemerintah daerah lebih tunduk pada pemerintah pusat dan kurang terbuka terhadap masukan dari masyarakat lokal. Dengan merujuk pada kasus Afrika dapatlah dikemukakan bahwa negara (pemerintah) adalah sumber utama kegagalan pembangunan yang terjadi. Pemerintahan yang besar (*Big government*) telah menjadi sumber bagi terciptanya pemerintahan yang buruk (*bad government*) yang dimaknai sebagai pemerintahan yang tidak representatif dan sistem non pasar yang tidak efisien (Weiss, 2000).

Pedagang di pasar tradisional di Bangkok selama 3 atau 4 dekade terakhir merasakan pahitnya era globalisasi, dimana pemerintah setempat memberikan kebebasan kepada perusahaan transnasional investor asing bermodal besar masuk dalam dunia perdagangan dengan sistem manajemen yang lebih modern dan inovatif, berteknologi tinggi yang berdampak pada penutupan usaha para pedagang tradisional (Wongleedee, 2015). Di sisi lain minimnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki pedagang dan pengelola pasar akan perubahan selera masyarakat, perubahan gaya hidup konsumen yang selalu berubah-ubah mengikuti waktu, kurangnya kemampuan pedagang dalam memberikan pelayanan serta cara memajang dagangan yang masih konvensional serta kurang mempromosikan dagangannya turut berperan serta dalam menurunnya pendapatan mereka.

Revitalisasi pasar tradisional tidak hanya semata pembenahan fisik semata, melainkan juga pembenahan infrastrukturnya, seperti penataan zona parkir yang selama ini kurang memadai, perawatan gedung dan penertiban stand-stand yang melampaui batas peletakan dagangannya. Terdapat korelasi antara perilaku pembelian terhadap infrastruktur tersebut. Banyak hasil penelitian menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan akan berdampak pada pembelian kembali di pasar yang sama serta mereka akan merekomendasikan pasar tersebut ke orang lain. Faktor-faktor inilah yang belum terpikirkan oleh para pembuat kebijakan (anggota DPRD) serta pejabat pemerintah dalam merevitalisasi pasar tradisional. Mereka jarang melibatkan masyarakat dan pedagang dalam proses revitalisasi tersebut, harapan mereka cukup sederhana, yaitu

dilibatkan dalam proses perencanaan karena mereka sendirilah yang mengetahui secara pasti tentang bagaimana sebuah pasar tradisional berinteraksi dengan pelanggannya.

Apabila sebuah pasar tradisional dikelola secara baik dan benar dengan melibatkan pedagang, akan memberikan daya tarik bagi wisatawan lokal maupun dari manca negara, seperti pasar apung di Thailand maupun di Kalimantan Selatan. Produk-produk yang di jual di pasar tematik tersebut mencerminkan kearifan budaya lokal serta produk home industri di daerah tersebut sekaligus sebagai ajang promosi gaya hidup masyarakat setempat (Wongleedee, 2015), di samping tentunya juga akan meningkatkan pendapatan warga lokal tersebut yang pada akhirnya akan juga memberikan kontribusi pada peningkatan PAD.

3. Kesimpulan

Model revitalisasi pasar tradisional yang memfokuskan pada pengembangan sinergi antara negara, masyarakat bisnis dan civil society yang dilandasi pada kapasitas untuk membangun konsensus, bekerja-sama dan saling akomodatif yang dilandasi oleh relasi saling kesetaraan niscaya akan membuahkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuannya meningkatkan kesejahteraan pedagang serta juga sebagai ajang promosi kearifan budaya lokal yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD suatu daerah. Diperlukan adanya "good will" dari pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah untuk melibatkan dan mengakomodir berbagai masukan yang konstruktif dari pedagang guna keberhasilan program revitalisasi pasar tradisional. Banyak kasus yang terjadi ketika sebuah program revitalisasi yang dilaksanakan tanpa pelibatan masyarakat dan pedagang yang ditemui hanyalah sebuah bangunan baru yang nyaman dan megah tanpa adanya interaksi jual-beli antara penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Akortor, E.S.A, 2011, *Deliberative Democracy: An Analysis of Citizens' Perspective in Buyukkonuk – North Cyprus*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 35 (2012) 301 – 312
- Balitbang PU, 2011, Executive Summary Kajian Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Modal Sosial.
- Curry, Gregory, 2007, "Case Study: Improving Customer Service at the NSW Registry of Births, Deaths and Marriages", *The Australian Journal of Public Administration*, vol. 66, no. 1, pp. 104-111 doi:10.1111/j.1467-8500.2007.00518.x © National Council of the Institute of Public Administration Australia. Australia: Published by Blackwell Publishing Limited
- Dietsch, Peter, 2010, *The Market, Competition, and Equality*, *Politics Philosophy Economics* 2010 9: 213, DOI: 10.1177/1470594X09359148, Sage Publications, <http://ppe.sagepub.com/content/9/2/213>
- Dwiyanto, Agus dkk, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herbst, Kenneth.C. et.al., 2007, "Changes in Family Dynamics Predict Purchase and Consumption", *British Food Journal* Vol. 109 No. 8, 2007 pp. 648-655, Emerald Group Publishing Limited 0007-070X, DOI 10.1108/00070700710
- Keban, Yeremias T. (2004) *Six Dimensions of Strategic Public Administration: Concepts, Theories and Issues* (First Edition), Yogyakarta: Gava Media,.

- Kirmanto, Djoko., 2006, *Spatial Database Integration For Development In The Comfortable Achieve Nusantara Room, Productive and Sustainable Development in the framework of NKRI*, Papers In the National Seminar, Jakarta, March 22, 2006
- Leach, R and Smith, Janie Percy, 2001, *Local Governance in Britain*, Palgrave, Houndmills, Basingtoke, New York: Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue.
- LGSP, 2009, *Traces telescoped struggle Regional Legislative Series*, Legislative Strengthening, USAID
- Liu, Honglei et.al., 2016, Relationship between service quality and customer equity in traditional markets, *Journal of Business Research* 69, 3827–3834, Elsevier Inc.
- Mc. Auslan, Patric. 1986, *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*, PT Gramedia, Jakarta.
- Mustalahti, I, & Rakotonarivo, O.S., 2014, *REDD+ and Empowered Deliberative Democracy: Learning from Tanzania*, *World Development* Vol. 59, pp. 199–211, 2014, Elsevier Ltd
- Nielson, AC. 2004. *Modern Supermarket* (Terjemahan AW Mulyana). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Nugroho D, Riant, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Regulatory President of the Republic Indonesia Number 112 Tahun 2007 about Traditional Market Development, Shopping Center, and Modern Store,
- Stehr, Nico et.al, 2010, *Consumption Between Market And Morals : A Socio-Cultural Consideration Of Moralized Markets*, *European Journal Of Social Theory* 2010 13: 213, DOI: 10.1177/1368431010362287, Sage Publications, [Http://Est.Sagepub.Com/Content/13/2/213](http://Est.Sagepub.Com/Content/13/2/213)
- Utoyo, Bambang, 2010., *Penerapan Prinsip Governance Dalam Perencanaan Tata Ruang Kota*, Disertasi Program Doktor Ilmu Administasi, Universitas Brawijaya Malang.
- Weiss, Thomas, 2000, *Governance, Good Governance and Global Governance : Conceptual and Actual Challenges*, *Third World Quarterly Journal of Emerging Areas*, Vol. 21 N. 5 October 2000
- Wongleedee, K., 2015, *Marketing Mix and Purchasing Behavior for Community Products at Traditional Markets*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 197 (2015) 2080 – 2085, Elsevier Ltd
- (<https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/10/18/090813262/kemendag-revitalisasi-272-pasar-pada-2017>)